

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan



Juknis Pemetaan Program Penyelarasan Pendidikan dengan Dunia Kerja 2012





KATA SAMBUTAN

Kebijakan pembangunan pendidikan nasional diarahkan untuk mewujudkan pendidikan yang berkeadilan, bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka dalam pelaksanaan pendidikan nasional bertumpu pada 5 prinsip: 1) ketersediaan berbagai program layanan pendidikan; 2) biaya pendidikan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat; 3) semakin kualitasnya setiap jenis dan jenjang pendidikan; 4) tidak adanya perbedaan layanan pendidikan ditinjau dari berbagai segi; dan 5) jaminan lulusan untuk melanjutkan dan keselarasan dengan dunia kerja.

Sesuai dengan prinsip yang ke-5 mengenai keselarasan pendidikan dengan dunia kerja, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (PAUDNI) sebagai salah-satu unit utama di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang ditunjuk sebagai pelaksana program penyalarsan pendidikan dengan dunia kerja, berupaya mewujudkan prinsip tersebut melalui penyelenggaraan kajian pemetaan. Kajian pemetaan dimaksudkan untuk mendapatkan profil yang akurat dari sisi pasokan (penyelenggara pendidikan) dan sisi permintaan (dunia usaha/dunia industri/dunia kerja) dalam empat dimensi yang dikaji yaitu dimensi kuantitas, dimensi kualitas, dimensi lokasi, dan dimensi waktu .

Kegiatan pemetaan ini merupakan salah satu bagian dari sebuah kerangka kerja penyalarsan antara pendidikan dengan dunia kerja. Untuk itu, secara serentak perlu dilakukan kajian pemetaan dari sisi *supply* (pasokan) dan sisi *demand* (permintaan) serta aspek-aspek lain, sehingga pada akhirnya dapat dilihat secara komprehensif profil penyalarsan antara pendidikan dengan dunia kerja di wilayah kajian. Akhirnya, dengan terbitnya petunjuk teknis ini diharapkan dapat dijadikan pegangan dan acuan yang jelas bagi seluruh *stakeholder* terutama pelaksana kegiatan pemetaan.

Jakarta, Maret 2012
Direktur Jenderal,

Dr. Lidya
NIP.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya serta kerja keras tim penyusun telah berhasil menyusun petunjuk teknis yang dapat dijadikan acuan para pelaksana kegiatan pemetaan sisi pasokan dan sisi permintaan berdasarkan empat dimensi utama yaitu dimensi kuantitas, kualitas, lokasi dan waktu serta analisisnya. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada para penyusun yang telah mencurahkan pikiran, waktu, dan tenaganya, sehingga petunjuk teknis ini siap untuk disosialisasikan.

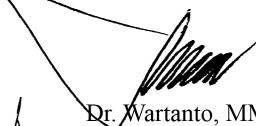
Petunjuk teknis ini disusun berdasarkan kebutuhan informasi dan analisis yang diperlukan di setiap wilayah kajian, sehingga dapat dielaborasi menjadi dasar bagi penyusunan upaya perbaikan khususnya melalui program penyelarasan pendidikan dengan dunia kerja. Di samping itu, kebutuhan informasi ini juga sangat diperlukan dalam mendukung efektivitas implementasi Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 (MP3EI), untuk itu pada kajian akan difokuskan pada wilayah dengan berbasis pada Koridor Ekonomi yang dinyatakan dalam dokumen MP3EI. Informasi yang akurat sangat diperlukan untuk mendisain sebuah program relevan yang efektif. Untuk itu, sangat diharapkan petunjuk teknis ini nantinya dapat digunakan secara disiplin dalam melaksanakan kajian.

Dengan adanya kegiatan pemetaan ini, kami berharap akan memberikan kontribusi yang positif terhadap pencapaian tujuan pembangunan pendidikan di Indonesia terutama untuk mendukung terciptanya keselarasan antara sisi pasokan dan juga sisi permintaan. Oleh karena itu, kami mengajak semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pemetaan agar berpartisipasi secara aktif dan maksimal agar tercapai target dan kualitas yang diharapkan pada tahun 2012. Kami memerlukan dukungan semua pihak, agar pemanfaatan petunjuk teknis tersebut dapat memenuhi prinsip-prinsip tepat sasaran, tepat penggunaan, bermutu, jujur, transparan, dan akuntabel. Kami menyadari sepenuhnya bahwa tidak ada gading yang tak retak. Oleh karena itu, kritik, usul, atau saran yang konstruktif sangat kami harapkan sebagai bahan pertimbangan untuk menyempurnakan petunjuk teknis tersebut di masa mendatang.

Demikian kiranya panduan ini dibuat, semoga dapat bermanfaat dan mendukung suksesnya kegiatan pemetaan.

Jakarta, Mei 2012
Direktur,

Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan



Dr. Wartanto, MM
NIP19631009 1989031 001



DAFTAR ISI

SAMBUTAN.....	1
KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN.....	5
A. Latar Belakang	5
B. Dasar Hukum.....	6
C. Tujuan Pedoman.....	7
D. Indikator Keberhasilan.....	7
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN.....	8
A. Pelaksana Kegiatan Pemetaan.....	8
B. Jenis Sektor Pemetaan	8
C. Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan	9
BAB III PENYUSUNAN, PENGAJUAN DAN PENETAPAN PROPOSAL.....	11
A. Penyusunan dan Pengajuan Proposal.....	11
B. Waktu Pengajuan Proposal	11
C. Mekanisme Penilaian Proposal	12
D. Penetapan Proposal.....	13
BAB IV PENYALURAN DAN PEMANFAATAN DANA	14
A. Penyaluran Dana.....	14
B. Jumlah Dana	14
C. Pemanfaatan Dana	14
BAB V PROSEDUR PEMANTAUAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN	16
A. Pemantauan Program.....	16
B. Mekanisme Pemantauan.....	16
C. Mekanisme Pengawasan	17
D. Mekanisme Pelaporan.....	17
BAB VI PENUTUP.....	19



LAMPIRAN	20
1. Format Proposal.....	20
2. Contoh Cover Proposal.....	21
3. Daftar Lembaga/Institusi Calon Responden	22
4. Contoh Formulir Pendaftaran	23
5. Contoh Formulir Pemetaan Permintaan Sisi Pasokan	24
6. Matrik Penggunaan Dana Pelaksanaan Program Pemetaan.....	26
7. Log Book Pemetaan.....	27
8. Surat Pernyataan Lembaga	28
9. Pakta Integritas	29
10. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak	30



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan pendidikan telah dilakukan oleh berbagai pihak, baik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun Kementerian Negara lainnya. Kenyataan bahwa pengangguran masih relatif tinggi di Indonesia menuntut pemerintah dan pihak terkait merumuskan sebuah kerangka kerja yang komprehensif dengan memperhatikan berbagai kondisi, baik internal maupun eksternal, sehingga ke depan bisa terjadi peningkatan keselarasan antara pendidikan dengan dunia kerja yang diukur berdasarkan capaian nilai indeks keselarasan (*Alignment Index*).

Penyelarasan pendidikan dengan dunia kerja merupakan sebuah upaya komprehensif untuk mensinkronkan pendidikan nasional dengan kebutuhan dunia kerja, sehingga terjadi keselarasan dalam pelaksanaannya. Pemetaan dan analisis sisi pasokan dalam dimensi kualitas, kuantitas, lokasi dan waktu adalah salah satu program penyelarasan yang bertujuan untuk mengidentifikasi kemampuan pasokan dunia pendidikan dalam hal kualifikasi/kompetensi, sehingga kita dapat mengetahui kemampuan sisi pasokan untuk menghasilkan kualifikasi yang diharapkan dunia kerja hingga pada akhirnya lulusan yang dihasilkan dapat terserap di dunia kerja. Adapun tujuan dari kegiatan pemetaan dan analisis sisi pasokan dan permintaan dalam dimensi kualitas, kuantitas, lokasi dan waktu ini adalah (1) mengetahui laju pasokan yang dihasilkan setiap tahunnya di tiap sektor dan lokasi, (2) mengetahui karakteristik kebutuhan dunia kerja atas lulusan, (3) melakukan analisis integrasi pasokan semua level dibandingkan kemampuan serap dunia kerja berdasarkan sektor untuk dapat memberikan rekomendasi strategi peningkatan kualitas pendidikan dalam penyesuaian pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja serta (5) melakukan analisis kebutuhan SDM di semua sektor berbasis pada kebutuhan koridor ekonomi yang mengacu pada Master Plan Perluasan dan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025.

Pemahaman dengan baik atas kondisi yang ada saat ini khususnya dari sisi pasokan (dunia pendidikan) dan sisi permintaan (dunia kerja) serta analisis yang tajam dan efektif sangat diperlukan, sehingga dapat diperoleh informasi kondisi eksisting dan yang akan datang yang akurat dalam menggambarkan situasi pendidikan dan dunia kerja yang sebenarnya baik dari pendidikan formal, informal maupun nonformal, serta berbagi sektor dunia kerja. Oleh karena itu, kajian ini menjadi sangat penting untuk dilakukan.

Berdasarkan dari informasi ini akan dapat sebuah rencana penyelarasan yang lebih komprehensif dan terintegrasi. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka akan ada beberapa Lembaga Penelitian yang akan diundang Perguruan Tinggi yang terpilih untuk melaksanakan kajian pemetaan sisi pasokan dalam rangka program penyelarasan pendidikan dengan dunia kerja. Pemilihan Lembaga Pelaksana kajian Perguruan Tinggi tersebut didasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain melakukan pemetaan, Lembaga tersebut juga akan melakukan analisis terhadap hasil pemetaan yang dilakukan serta merumuskan strategi dan juga saran-saran



yang berguna untuk meminimalisasi gap yang ada di antara sisi pasokan dan juga sisi permintaan sehingga dapat terwujud keselarasan.

1.2. Dasar Hukum

Srigrunani 28/2/12 3:13 PM

Comment: Mohon pak Pur bisa cek updatenya

Dasar hukum yang menjadi acuan dari program penyesuaian ini yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005—2025.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2007 tentang Alokasi, Klasifikasi, Mekanisme Belanja dan Pertanggungjawaban Anggaran Belanja.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2006 tentang Bantuan Untuk Lembaga Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan.
8. Rencana Strategis (Renstra) Ditjen PAUDNI 2010-2015.
9. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan tahun 2011.

1.3. Tujuan Pedoman

Tujuan disusunnya petunjuk teknis ini adalah untuk memberikan acuan yang jelas bagi *stakeholders* yang terlibat dalam proses pemetaan, terutama tim pelaku kegiatan pemetaan yang dikoordinir oleh seorang *team leader*. Dengan adanya acuan yang jelas tersebut, maka *stakeholders* tidak akan kesulitan dalam menjalankan proses-proses pemetaan yang terdiri dari pemetaan kemampuan pasokan dunia pendidikan dan kebutuhan dunia kerja juga analisis dari hasil pemetaan kedua sisi tersebut.

1.4. Ruang lingkup kajian

Kajian pemetaan pada tahun 2012 akan difokuskan untuk melengkapi hasil kajian di dua tahun sebelumnya. Untuk itu ditetapkan beberapa pilihan kajian yang akan ditawarkan pada kandidat lembaga pelaksana beberapa topik kajian sebagai berikut :

1. Kajian pemetaan sisi pasokan dalam dimensi kualitas, kuantitas, lokasi dan waktu dan analisisnya pada satu dari beberapa wilayah kajian yang ditawarkan yaitu di kota Denpasar dan Kupang.
2. Kajian pemetaan sisi permintaan dalam dimensi kualitas, kuantitas, lokasi dan waktu dan analisisnya pada satu dari beberapa wilayah kajian yang ditawarkan yaitu di kota Denpasar dan Kupang.



3. Kajian Integrasi pemetaan sisi pasokan dan permintaan dalam dimensi kualitas, kuantitas, lokasi dan waktu serta analisisnya pada lokasi pilot.
4. Kajian proyeksi dan analisis kebutuhan sisi permintaan terhadap pendidikan kejuruan dalam mendukung pembangunan nasional yang mengacu pada MP3EI.

1.5. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan kegiatan pemetaan dapat dilihat dari :

Kajian 1

1. Adanya hasil pemetaan di wilayah kajian berupa peta pasokan pada tiga tingkat pendidikan saat ini dalam dimensi kualitas, kuantitas, lokasi dan waktu.
2. Adanya laporan hasil pemetaan sisi pasokan dan sisi permintaan di setiap wilayah kajian.
3. Adanya data pendukung program pemetaan guna dilakukan verifikasi ulang. Misal: data pasokan berupa jumlah lulusan, data laju pasokan, dan lain-lain.
4. Adanya peta pasokan yang mampu memperlihatkan status kecukupan pasokan pada tiga level pendidikan sesuai yang tertera dalam ruang lingkup yang dinyatakan dalam Alignment Index (AI), dengan menggunakan model yang tersedia.
5. Adanya analisis kemampuan pasokan dunia pendidikan dalam hal kualifikasi/kompetensi dikaitkan dengan persoalan penyalarsan pendidikan dengan dunia kerja.
6. Adanya mekanisme kerja pemetaan sisi pasokan yang dilengkapi dengan sejumlah instrumen untuk mempermudah pemutakhiran data terkait dengan pemetaan kemampuan pasokan dunia pendidikan.
7. Adanya luaran makalah yang siap diterbitkan di media massa baik artikel ilmiah maupun artikel umum.

Kajian 2

1. Adanya hasil pemetaan di wilayah kajian berupa peta permintaan pada tiga sektor unggulan wilayah kajian dalam dimensi kualitas, kuantitas, lokasi dan waktu
2. Adanya laporan hasil pemetaan sisi permintaan di setiap wilayah kajian
3. Adanya data pendukung program pemetaan permintaan guna dilakukan verifikasi ulang. Misal: data industri/usaha/instansi yang di survei, data sektor unggulan wilayah kajian dan data-data serta informasi lain yang relevan.
4. Adanya peta permintaan yang mampu memperlihatkan status pemenuhan permintaan pada tiga sektor unggulan di wilayah kajian.
5. Adanya analisis pemenuhan permintaan dunia usaha/dunia industri dalam hal kualifikasi/kompetensi dikaitkan dengan persoalan penyalarsan pendidikan dengan dunia kerja yang dinyatakan dalam *Fulfillment Index* (FI) dengan menggunakan model yang telah tersedia.
6. Adanya mekanisme kerja pemetaan sisi permintaan yang dilengkapi dengan sejumlah instrumen untuk mempermudah pemutakhiran data terkait dengan pemetaan kebutuhan dunia kerja.



7. Adanya luaran makalah yang siap diterbitkan di media massa baik artikel ilmiah maupun artikel umum.

Kajian 3

1. Adanya hasil analisis pemetaan pasokan yang telah dilakukan di wilayah pilot pilihan (Surabaya atau Pekanbaru) dalam dimensi kualitas, kuantitas, lokasi dan waktu.
2. Adanya hasil analisis pemetaan permintaan yang telah dilakukan di wilayah pilot pilihan (Surabaya atau Pekanbaru) dalam dimensi kualitas, kuantitas, lokasi dan waktu.
3. Adanya analisis integrasi pasokan dan pemetaan di wilayah pilot yang memberikan hasil :
 - a. Kemampuan pasokan dunia pendidikan dalam hal kualifikasi/kompetensi dikaitkan dengan persoalan penyelarasan pendidikan dengan dunia kerja.
 - b. Kemampuan dunia usaha dalam menyerap tenaga kerja dan tingkat pemenuhannya.
 - c. Rekomendasi strategi pembangunan pendidikan di wilayah pilot untuk peningkatan keselarasan pendidikan dengan dunia kerja
 - d. Rekomendasi strategi dan kebijakan pemerintah dalam upaya meningkatkan indeks keselarasan (Alignment Index) dan indeks pemenuhan (Fulfillment Index) di wilayah pilot.
 - e. Rekomendasi tindak lanjut untuk penyelarasan pendidikan dengan dunia kerja di wilayah pilot .
4. Adanya luaran makalah yang siap diterbitkan di media massa baik artikel ilmiah maupun artikel umum.

Kajian 4

1. Adanya proyeksi jumlah kebutuhan lulusan pendidikan kejuruan (SMK, BLK, LKP Politeknik) untuk setiap sektor permintaan di beberapa wilayah koridor ekonomi yang mengacu pada MP3EI
2. Adanya hasil analisis proyeksi pemenuhan SDM dibidang kejuruan pada setiap koridor ekonomi di Indonesia dan rekomendasi upaya pemenuhannya.
3. Adanya laporan hasil kajian yang disertai data pendukung misal: data industri/usaha/instansi yang di survei, data sektor unggulan wilayah kajian dan data-data serta informasi lain yang relevan.
4. Adanya analisis pemenuhan permintaan dunia usaha/dunia industri dalam hal kualifikasi/kompetensi dikaitkan dengan persoalan penyelarasan pendidikan dengan dunia kerja.
5. Adanya luaran makalah yang siap diterbitkan di media massa baik artikel ilmiah maupun artikel umum.



BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1. Pelaksana Kegiatan Pemetaan

Pelaksana kegiatan pemetaan adalah Perguruan Tinggi yang memiliki kelayakan baik secara kompetensi, kelembagaan, kelengkapan administrasi maupun kelayakan teknis pengelolaan. Adapun persyaratan dan kriteria yang harus dipenuhi guna menjadi pelaksana program pemetaan adalah:

1. Persyaratan Teknis
 - a. Mampu melaksanakan kajian sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.
 - b. Mampu mengakomodasi fasilitas yang mendukung proses pemetaan.
 - c. Diutamakan yang memiliki jaringan kemitraan dengan lembaga/unit usaha yang relevan dengan yang akan dipetakan.
2. Persyaratan Administrasi
 - a. Memiliki surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kepala dari Institusi/ Lembaga yang menaungi pelaksana kegiatan pemetaan.
 - b. Memiliki nomor rekening bank dan NPWP atas nama lembaga (Nama dan alamat lembaga pada rekening bank dan NPWP harus sama).
 - c. Melampirkan Surat Keterangan rekening masih aktif dari bank.
 - d. Memiliki struktur organisasi yang jelas beserta stempel lembaga.

2.2. Jenis Sektor Pemetaan

Pemetaan sisi pasokan dilakukan di beberapa wilayah kajian diantaranya Samarinda, Banjarmasin, Denpasar, Kupang, Manado, Makasar, Jayapura, Pekanbaru dan Surabaya. Kajian (1) dapat dipilih satu wilayah kota kajian yaitu Banjarmasin, Makasar, Denpasar, Kupang, Manado dan Jayapura, kajian (2) dengan daerah kajian kota Denpasar, Kupang, Manado dan Jayapura, kajian (3) diperlukan untuk dua kajian masing-masing untuk satu wilayah kota yaitu Surabaya atau Pekanbaru serta untuk kajian (4) meliputi kajian di wilayah koridor ekonomi berbasis pada MP3EI yang masing-masing memuat minimum tiga wilayah koridor ekonomi dalam MP3EI. Kegiatan Pemetaan pasokan tahun 2012 ini merupakan kelanjutan dari dua tahun sebelumnya dan bersifat melengkapi dari sisi wilayah kajian, sehingga dapat melengkapi informasi kondisi pasokan (pendidikan) di Indonesia yang lebih representatif dan komprehensif lagi. Disisi lain, juga dilakukan pemetaan permintaan di wilayah kajian dengan fokus pada tiga sektor unggulan. Sebagai pertimbangan konkrit pada kajian ini juga akan dilakukan dua kajian masing-masing satu untuk sisi pasokan dan satu kajian sisi permintaan untuk tingkat pendidikan kejuruan pada beberapa wilayah koridor ekonomi. Adapun masing-masing sektor kajian dari keempat kajian secara spesifik akan diuraikan pada sub bagian ini.



Sektor pada Kajian 1

Lembaga-lembaga/institusi penghasil tenaga kerja sesuai dengan bidang keahlian atau jurusan berbasis di tingkat pusat dan pada tingkat lokal pada sektor pendidikan formal dan informal di suatu daerah yang disertai dengan data-data pendukung yang menunjang, dalam beberapa wilayah kajian yaitu Denpasar dan Kupang dengan berbasis pada data sekunder yang telah ada baik pada tingkat pusat, regional (Propinsi) maupun lokal (Kabupaten/Kota) dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pada tingkat pusat pemetaan dilakukan berbasis populasi nasional.
2. Pada tingkat propinsi dilakukan populasi propinsi dimana wilayah kajian berada.
3. Pada tingkat kabupaten/kota dilakukan berbasis populasi pada wilayah kabupaten/kota kajian.
4. Pada tingkat lembaga pendidikan berdasarkan populasi
5. *Tracer study* dan *in depth interview* hanya akan dilakukan pada sampel yang mewakili tiga sektor unggulan di wilayah Kota dan Propinsi kajian.

Sektor pada Kajian 2

Pemetaan kebutuhan dunia kerja dilakukan pada sektor yang menjadi prioritas atau unggulan di suatu daerah yang disertai dengan data-data pendukung yang menunjang. Kajian dilakukan dilakukan hanya pada 3 sektor utama yang menjadi prioritas wilayah tersebut dan mengacu pada koridor ekonomi sesuai MP3EI. Pada setiap sektor yang dikaji tersebut dapat terpetakan kebutuhan berdasarkan empat dimensi yaitu kualitas, kuantitas, lokasi dan waktu.

Sektor pada Kajian 3

Kajian ke-3 merupakan kajian integrasi di wilayah kota terpilih, pada kesempatan ini akan dilakukan analisis integrasi pemetaan di dua wilayah secara terpisah yaitu Pekanbaru dan Surabaya. Dengan berbekal pada kajian pemetaan yang telah dilakukan di dua wilayah kota tersebut, dimana materinya nantinya akan diberikan pada pengusul yang memenangkan hibah ini, maka perlu dilakukan analisis integrasi dan komprehensif penyelarasan pendidikan dengan dunia kerja di wilayah tersebut. Pada kajian integrasi ini perlu dilakukan pendalaman dalam bentuk pengumpulan data primer yang masih diperlukan untuk melengkapi informasi integrasi. Konsistensi sektor permintaan tetap mengacu pada koridor ekonomi berdasar MP3EI sementara di sisi pasokan memperhatikan semua level pendidikan yang dapat mendukung pembangunan di wilayah terpilih sesuai koridor ekonomi yang ditetapkan.

Sektor pada Kajian 4

Pada **kajian 4**, sektor pendidikan yang akan dikaji hanya spesifik pada pendidikan kejuruan (SMK, BLK, LKP dan Politeknik), hal ini dikarenakan pendidikan kejuruan diharapkan dapat menghasilkan SDM yang mampu membangun bangsa melalui pengetahuan dan ketrampilannya. Potret distribusi kerja lulusan bidang kejuruan perlu ditampilkan dengan basis sampling secara proporsional di wilayah yang diusulkan sesuai dokumen petunjuk teknis. Sementara itu untuk juga perlu digambarkan peta sektor dunia kerja yang dituju. Analisis perlu dikaitkan dengan tingkat dukung



untuk MP3EI saat ini dan pola pengembangan pendidikan kejuruan yang efektif untuk mendukung MP3EI.

2.3. Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan

Dalam melaksanakan kegiatan pemetaan, ada beberapa langkah-langkah yang harus dilalui, antara lain adalah:

1. Penyebaran informasi tentang kegiatan pemetaan melalui website Kemdikbud (*call for proposal*)
2. Pengumpulan dan pengajuan proposal pelaksanaan kegiatan pemetaan paling lambat 11 Juni 2012.
3. Evaluasi proposal yang diterima dan menetapkan beberapa lembaga yang telah memenuhi syarat dan dinyatakan lolos seleksi.
4. Workshop Metodologi Pemetaan dan Penetapan Instrumen Pemetaan dengan mengundang lembaga yang dinyatakan lolos seleksi.
5. Pendistribusian panduan beserta instrumen dan perangkat lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pada saat *workshop* diadakan.
6. Lembaga memperbaiki proposal sesuai dengan hasil rekomendasi pada saat *workshop*.
7. Melakukan kajian sesuai dengan petunjuk dan ruang lingkup kegiatan yang dinyatakan dalam dokumen petunjuk teknis.
8. Pelaksanaan kegiatan pemetaan selama empat bulan setelah dana *blockgrant* dicairkan.
9. Bagi pelaksana kajian [1] dan [2] mengisi form/kuisisioner pemetaan yang dapat diakses di website www.penyelarasan.kemdiknas.go.id, kemudian diisi sesuai dengan data yang telah diperoleh berdasarkan hasil survei yang dilakukan sebelumnya.
10. Pengisian *log book* pelaksanaan kegiatan sebagaimana terlampir pada Lampiran.
11. Pelaporan hasil kegiatan Pemetaan secara periodik kepada sekretariat Tim Penyelarasan baik secara langsung maupun secara online.
12. Tim Penyelarasan akan melakukan *in-depth interview* dalam rangka proses monitoring dan evaluasi proses pelaksanaan kegiatan pemetaan.

Apabila ada beberapa hal yang masih kurang jelas berkaitan dengan pengisian form pemetaan, dapat mengajukan pertanyaan secara langsung dengan menggunakan sistem *chatting online* pada saat mengakses website www.penyelarasan.kemdiknas.go.id.



BAB III

PENYUSUNAN, PENGAJUAN DAN PENETAPAN PROPOSAL

3.1. Penyusunan dan Pengajuan Proposal

Lembaga yang berminat menjadi penyelenggara program pemetaan wajib menyusun proposal sesuai format yang terlampir pada Lampiran 1 yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung yang dibutuhkan. Proposal yang sudah dilengkapi dengan dokumen pendukung, dibuat rangkap dua, dengan melampirkan:

1. Fotokopi rekening bank atas nama lembaga, disertai dengan Surat Keterangan masih aktif dari bank bersangkutan.
2. Fotokopi NPWP atas nama lembaga.
3. Surat rekomendasi dari Kepala/Pimpinan lembaga yang menaungi pelaksana kegiatan pemetaan.
4. Struktur organisasi lembaga.
5. Pakta Integritas Lembaga, dengan format terlampir.
6. Surat Pernyataan Kesanggupan, dengan format terlampir.
7. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, dengan format terlampir.

Proposal yang sudah dilengkapi dokumen-dokumen di atas, dikirimkan kepada :

Kepada Yth: Tim Penyelaras Pendidikan dengan Dunia Kerja
a.n. Purwanto, M.Si.
Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Ditjen PAUDNI
Kompleks Kementerian Pendidikan Nasional,
Gedung E lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Selatan 10270

3.2. Waktu Pengajuan Proposal

Proposal harus diterima oleh Tim Penyelaras Pendidikan dan Dunia Kerja, selambat-lambatnya **pada minggu ketiga bulan April 2012**. Pelaksanaan kegiatan pemetaan akan dilakukan secara berkesinambungan hingga selesai dan laporan kegiatan harus diserahkan paling lambat empat bulan setelah tanggal penandatanganan kontrak.

3.3. Mekanisme Penilaian Proposal

1. Pembentukan Tim Penilai

- a. Tim Penilai Proposal pemetaan dibentuk, ditetapkan, dan bertanggungjawab kepada Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan
- b. Tim Penilai terdiri dari atas unsur akademisi, birokrasi, dan independen yang relevan



- c. Struktur tim penilai minimal terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan 3 orang anggota serta didukung oleh Tim Sekreariat.
- d. Tim penilai proposal bekerja setelah mendapat Surat Keputusan dari Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan
- e. Tim penilai melaporkan hasil-hasil penilaian proposal pemetaan kepada Direktur Pembinaan Kurus dan Pelatihan.

2. Penilaian Proposal:

Proposal yang diterima akan dievaluasi berdasarkan pada beberapa kriteria yang telah ditentukan. Adapun kriteria yang digunakan dalam penilaian proposal adalah sebagai berikut :

- a. Kompetensi lembaga yang mengajukan (berdasarkan *track record* lembaga dalam melakukan kajian yang relevan, dan kesesuaian kompetensi anggota tim pelaksana kajian).
- b. Kualitas proposal yang dilihat berdasarkan kualitas isi dan pemenuhan format serta lampiran dokumen yang ditentukan.
- c. Kesesuaian dan rasionalitas anggaran yang diusulkan.

3. Verifikasi Lapangan

- a. Tim penilai melakukan verifikasi lapangan kepada lembaga yang proposalnya dinyatakan memenuhi persyaratan teknis maupun administrasi.
- b. Tim melakukan rapat pleno untuk menentukan nominasi lembaga calon penerima dana pemetaan.

3.4. Penetapan Proposal

1. Tim Penilai melakukan pengkajian kelayakan proposal yang mengacu pada pemenuhan persyaratan teknis dan administrasi. Apabila proposal dinilai layak, maka Tim Penilai akan memberikan pertimbangan atau rekomendasi kepada Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan untuk ditetapkan sebagai penerima bantuan.
2. Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan menerbitkan Surat Keputusan (SK) tentang Penetapan lembaga penerima bantuan pemetaan dengan memperhatikan rekomendasi dari Tim Penilai.
3. Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan serta Pimpinan Lembaga Penerima dana Pemetaan menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang lingkup pekerjaan dan penggunaan dana.
4. Lembaga yang ditetapkan sebagai penerima dana pemetaan wajib menyampaikan jadwal pelaksanaan pemetaan.



BAB IV PENYALURAN DAN PEMANFAATAN DANA

4.1. Penyaluran Dana

Mekanisme penyaluran dana pemetaan adalah sebagai berikut:

1. Setelah SK penetapan lembaga dan akad kerjasama ditandatangani oleh Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan dengan Lembaga calon penerima bantuan dana pemetaan, Ditbinsuslat mengajukan usulan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk membayarkan/mengirimkan dana bantuan pemetaan ke rekening lembaga penerima.
2. Lembaga penerima dana bantuan pemetaan wajib memulai pelaksanaan program pemetaan sesuai dengan lampiran akad kerjasama yang telah disetujui paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah dana cair.
3. Lembaga penerima dana blockgrant wajib membayar pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

4.2. Jumlah Dana

Besaran dana yang diberikan untuk lembaga pelaksana pemetaan rata-rata sebesar Rp 125.000.000,00 (Seratus duapuluh lima juta rupiah) untuk masing-masing lembaga, di mana akan terdapat 14 (empatbelas) lembaga terpilih yang menyelenggarakan pemetaan yang terdistribusi pada empat topik kajian yang telah ditetapkan.

4.3. Pemanfaatan Dana

Rincian penggunaan dana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 1. Alokasi dan Rincian Penggunaan Dana

No	Komponen Pembiayaan	Persentase
1	Biaya Perlengkapan, meliputi ATK dan lainnya	Maksimal 15%
2	Biaya Pelaksanaan meliputi transportasi dan akomodasi, pengolahan data, dan analisis hasil.	Minimal 60%
3	Biaya Manajemen (termasuk honorarium peneliti), meliputi penyusunan proposal, identifikasi dan perencanaan program, biaya penyusunan dan pengiriman, surat menyurat, serta pelaporan.	Maksimal 25%



BAB V PROSEDUR PEMANTAUAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

5.1. Pemantauan Program

Mengingat pentingnya menjaga mutu dan konsistensi program pemetaan, maka dilakukan pemantauan kegiatan dalam bentuk monitoring dan evaluasi. Pemantauan terhadap program akan dilakukan secara eksklusif oleh Tim Penyelarasan Pendidikan dengan Dunia Kerja. Adapun tujuan dilakukan pemantauan tersebut adalah:

1. Memastikan bahwa program berjalan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh Tim Penyelarasan.
2. Menggali permasalahan dan membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh penyelenggara dalam melaksanakan kegiatan.
3. Melaksanakan monitoring terhadap proses/hasil pelaksanaan program melalui *in-depth interview* pada beberapa responden yang terlibat dalam program.
4. Sebagai bahan evaluasi guna melakukan *improvement* untuk peningkatan mutu program di masa yang akan datang.

5.2. Mekanisme Pemantauan

Pemantauan terhadap pelaksanaan pemetaan dilakukan oleh Tim Penyelarasan selaku koordinator serta penanggung jawab program pemetaan. Proses pemantauan tersebut dilakukan sejak Oktober hingga November 2012. Adapun proses pemantauan yang dilakukan adalah dengan cara melakukan komunikasi secara *intens* setiap 2 minggu sekali kepada pelaksana program pemetaan dan melakukan monitoring data terhadap hasil pemetaan yang dilakukan oleh tim-tim pelaksana secara *sampling*.

Proses monitoring tersebut dapat berupa pengecekan data secara langsung kepada narasumber terkait, maupun dengan cara mendatangi lokasi pemetaan dan melakukan proses monitoring dan evaluasi terhadap hasil pemetaan yang telah dilakukan sebelumnya. Di mana setelah proses monitoring dan evaluasi tersebut, juga dibutuhkan pembuatan laporan monitoring dan evaluasi berdasarkan hasil pengisian *form* monitoring dan evaluasi yang telah diisi sebelumnya (ketika proses monitoring dan evaluasi dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung).

5.3. Mekanisme Pengawasan

Pengawasan dilakukan oleh petugas dari unsur internal dan eksternal

1. Unsur Internal

Pengawasan internal dilakukan dalam rangka memberikan pengarahan, pembinaan, dan bimbingan kepada lembaga penerima bantuan, agar pelaksanaan program



pemetaan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Unsur pengawas internal yaitu: 1) Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, termasuk Tim Penyelarasan; 2) Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional.

2. Unsur Eksternal

Pengawasan eksternal dilakukan dalam rangka memberikan pengarahan, pembinaan, dan bimbingan, serta saksi apabila diperlukan kepada lembaga penerima bantuan, agar pelaksanaan program pemetaan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Unsur pengawas eksternal yaitu:

- 1) Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
- 2) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); dan
- 3) Instansi lain yang ditugaskan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal.

5.4. Mekanisme Pelaporan

Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara berkesinambungan sampai dengan bulan Oktober 2012 dengan minimal satu kali dalam dua bulan menyampaikan laporan dan *update* informasi, baik secara online maupun *offline* sampai program selesai dilaksanakan.

Lembaga penerima program wajib membuat laporan pertanggungjawaban bantuan yang diterima. Laporan disampaikan kepada Tim Penyelarasan Pendidikan dengan Dunia Kerja, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (PAUDNI) Kemdiknas. Laporan akhir kegiatan yaitu setelah program pemetaan selesai dilakukan. Adapun detail mengenai pelaporan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Tujuan Laporan
 - a) Mengetahui bahwa dana bantuan diterima oleh lembaga.
 - b) Mengetahui pelaksanaan, perkembangan, hambatan dan keberhasilan program yang dilaksanakan.
 - c) Memenuhi akuntabilitas lembaga penyelenggara.
2. Tahapan dan isi Laporan

Pada tahap awal penerimaan dana, pengelola program harus menyampaikan laporan berupa lembaran bukti penerimaan pencairan bantuan. Laporan kegiatan disusun secara lengkap mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi serta tindak lanjut, disampaikan paling lambat dua minggu setelah program selesai dilaksanakan. Laporan ini sekurang-kurangnya memuat :

1. Proses pemilihan lembaga penyelenggara pendidikan yang akan di observasi
2. Pelaksanaan kegiatan pengisian program pemetaan yang meliputi tanggal pengisian dan identitas/biodata responden (*log book*).
3. Diterimanya dana bantuan sosial di rekening lembaga (tanggal dan jumlahnya).
4. Laporan teknis pelaksanaan program, sampai kepada kesimpulan dan analisis pelaksanaan program.
5. Pertanggungjawaban seluruh penggunaan keuangan (dalam bentuk pembukuan/neraca, disertai copy bukti-bukti pengeluaran dan setoran pajak).



6. Lampiran meliputi :

- a) Pemanfaatan dana beserta fotokopi bukti-bukti pengeluaran, termasuk setoran pajak sesuai ketentuan yang berlaku
- b) Dokumen pendukung lainnya
- c) Surat rekomendasi
- d) Foto-foto/rekaman dokumentasi kegiatan

Laporan tersebut disampaikan kepada Tim Penyelarasan Pendidikan dengan Dunia Kerja u.p. Purwanto, M.Si, Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal, Gedung E Lantai 6, Kompleks Kemdiknas, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan – Jakarta 10270.



BAB VI PENUTUP

Petunjuk teknis ini merupakan acuan bagi semua pihak yang berkepentingan dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan program pemetaan.

Apabila ada hal yang belum jelas, maka dapat menghubungi Tim Penyelarasan pada Direktorat Pendidikan Nonformal dan Informal dengan nomor telepon 021-5725041, Fax. 021-57904363 dan dapat mengunjungi website www.penyelarasan.kemdiknas.go.id. Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini, akan ditindaklanjuti dengan surat edaran atau surat resmi Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal.

Hal-hal lain yang juga perlu diperhatikan adalah sebagai berikut ini :

1. Tim Penyelarasan Pendidikan dengan Dunia Kerja, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal tidak memungut biaya apapun dan tidak menerima pengembalian dana bantuan dalam bentuk apapun untuk pencairan dana yang akan dan telah ditetapkan.
2. Lembaga penerima bantuan yang tidak menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan pada tahun sebelumnya, tidak akan dinilai untuk proses penerimaan dana program penyelarasan.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : Format Proposal

PETUNJUK PENYUSUNAN PROPOSAL

Sebagai dasar untuk melaksanakan program pemetaan adalah adanya proposal yang disusun oleh lembaga pelaksana program pemetaan berdasarkan sektor prioritas dan strategis.

Di dalam penyusunan proposal agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

A. Judul

Halaman paling depan proposal (Cover) harus ditulis dengan jelas judul proposal berikut alamat lengkap. Contoh cover terlampir di halaman sebelumnya.

B. Kata Pengantar

Ditulis maksud dan tujuan pengajuan proposal.

C. Bab Pendahuluan (Bab I)

Memuat tentang :

1. Latar belakang, yang menggambarkan profil lembaga/satuan, program-program yang telah dilaksanakan sebelumnya, masalah-masalah yang akan dihadapi berkaitan pelaksanaan pemetaan apabila diperoleh, dan pemanfaatan dana pelaksanaan pemetaan.
2. Tujuan, memuat tentang tujuan umum dan khusus dalam keterkaitannya dengan lembaga jika memperoleh bantuan dana pelaksanaan pemetaan.
3. Hasil yang diharapkan, memuat tentang target indikator kunci keberhasilan berkaitan dengan pelaksanaan program pemetaan berdasarkan sektor prioritas.

D. Metodologi Kajian (Bab II)

Penjelasan mengenai pendekatan atau metode penelitian yang akan digunakan ketika melaksanakan program pemetaan berdasarkan sektor prioritas dan strategis yang relevan dengan kajian yang diusulkan.

E. Jadwal Kegiatan

Berisi mengenai jadwal dari tahap-tahap kegiatan yang akan dilaksanakan.

F. Rencana Anggaran

Berisi rencana anggaran dari kegiatan program pemetaan yang akan dilaksanakan.

G. Susunan Tim Pelaksana

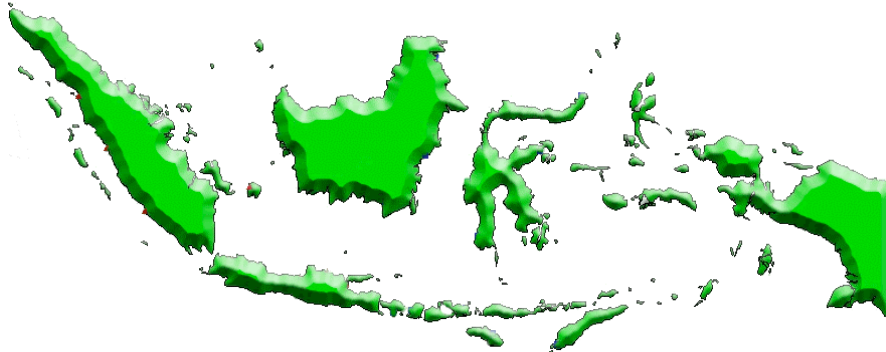
Berisikan susunan tim pelaksana yang akan melaksanakan kajian yang diusulkan disertai dengan pembagian tugas dan tanggung jawab serta dilampirkan Curriculum Vitae dari masing-masing anggota tim.

LAMPIRAN 2 : Contoh Cover Proposal





**PELAKSANAAN PROGRAM PEMETAAN DAN
ANALISIS SISI PASOKAN DALAM DIMENSI
KUALITAS, KUANTITAS, LOKASI DAN WAKTU**



PROPOSAL DIAJUKAN KEPADA :

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL (PNFI)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

GEDUNG E LANTAI 3 JALAN JENDERAL SUDIRMAN SENAYAN JAKARTA

OLEH :

LEMBAGA :

ALAMAT LENGKAP :

NO TELP/HP/FAX :



Lampiran 4: Contoh Formulir Pendaftaran

FORMULIR PENDAFTARAN

1. Judul Proposal :
2. Nama Lembaga :
3. Alamat Lembaga :
4. No Telp / No Fax :
5. Penanggung Jawab :
6. Alamat :
7. URL/http :
8. Nama Bank :
9. No Rek. Lembaga :
10. Atas Nama :
11. NPWP Lembaga :
12. Pilihan lokasi berdasarkan prioritas (diperlukan jika ada usulan yang memilih lokasi yang sama) *) :

Urutan pilihan lokasi untuk usulan kajian 1 :

- Banjarmasin
- Makasar
- Menado
- Denpasar
- Kupang
- Jayapura

Urutan pilihan lokasi untuk usulan kajian 2 :

- Menado
- Denpasar
- Kupang
- Jayapura

Urutan prioritas pilihan lokasi untuk usulan kajian 3 :

- Surabaya
- Pekanbaru

Urutan pilihan lokasi untuk usulan kajian 4 :

- Koridor Ekonomi Jawa dan Bali + NTT
- Koridor Ekonomi Sumatra, Kalimantan
- Koridor Ekonomi Sulawesi dan Ambon+Irian

Penerima,

*) isikan prioritas pilihan dalam kotak yang disediakan

Tanda Tangan, Stempel
(Nama Terang)

Lampiran 5: Contoh Matrik Penggunaan Dana

Matrik Penggunaan Dana Pelaksanaan Program Pemetaan



No	Dana diterima	Penarikan			Penggunaan		
		No	Penarikan	Jumlah (Rp)	No	Uraian Pengeluaran	Banyaknya
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1	Tanggal :2010	1	21-Sep-10	Rp 5.000.000,00		Pembelian ATK	
					1.1.	a. Kertas	1 rim Rp 40.000,00
						b. Tinta printer	2 buah Rp 460.000,00
2	Rp 30.000.000,00				1.2.	Bahan pemetaan	30 set Rp 4.500.000,00
					Sub Total 1		Rp 5.000.000,00
		2	30 Maret 2010	Rp 3.300.000,00	2.1.	Honorarium Petugas	3 orang Rp 2.550.000,00
					2.2.	Setor Pajak PPh 21 15% (PNS)	3 orang Rp 450.000,00
					2.3.	Transport Petugas	3 orang Rp 300.000,00
					Sub Total 2		Rp 3.300.000,00
		3
					Sub Total 3	
			Total Penarikan	Rp 8.300.000,00		Total Pengeluaran (sub total 1 + 2 + ...)	Rp 8.300.000,00
			Sisa	Rp 21.700.000,00			

.....,2012

Ketua / Pimpinan Lembaga

(.....)

Keterangan:

1. Kolom 1, diisi tanggal masuknya dana di rekening lembaga, baris 2 dst, diisi besar dana bantuan sosial yang diterima.
2. Diisi dengan nourut penarikan dari bank.
3. Diisi tanggal penarikan dari bank.
4. Diisi dengan jumlah dana yang ditarik dari bank.
5. Nomor urut pengeluaran/penggunaan dana, sekaligus dilampirkan bukti (kuitansi/nota) pengeluaran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.
6. Diisi dengan uraian/rincian pengeluaran/penggunaan dana.



Lampiran 7: Contoh Surat Pernyataan Lembaga

KOP SURAT LEMBAGA

SURAT PERNYATAAN*)

Yang bertandatangan di bawah ini, kami penerima bantuan dana Program Pemetaan tahun 2011.

Nama :

Jabatan :

Alamat Lembaga :

No Telp/HP :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kami sanggup :

1. Menyelenggarakan Program Pemetaan dan Analisis Sisi Permintaan berdasarkan dimensi kualitas, kuantitas, lokasi dan waktu sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam akad kerjasama.
2. Menerima sanksi apabila :
 - a. Melaksanakan program tidak sesuai dengan aturan kerjasama ;
 - b. Menggunakan anggaran tidak sesuai dengan aturan pengelolaan keuangan negara yang berlaku ;
3. Membuat laporan kegiatan, yaitu sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....2012

Yang Membuat Pernyataan

Materi Rp 6.000,-

Ketua Lembaga**)

(Nama Terang)

Catatan : *) Surat Pernyataan ditandatangani ketua lembaga bila usulan diterima



Lampiran 8 (Contoh Pakta Integritas)

KOP SURAT LEMBAGA

**PAKTA INTEGRITAS
PENYELENGGARAAN PROGRAM
PEMETAAN SISI PASOKAN**

Dalam rangka Program Pemetaan dan Analisis Sisi Permintaan Berdasarkan Dimensi Kualitas, Kuantitas, Lokasi dan Waktu pada Program Penyeragaman, Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal, yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa:

1. Tidak akan melakukan praktek Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN);
2. Sanggup melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam **Penyelenggaraan Program Bantuan Sosial (Blockgrant)** ini;
3. Melaksanakan tugas secara bersih, transparan, profesional, dan akuntabel dengan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian program;
4. Apabila melanggar hal-hal yang telah dinyatakan dalam Pakta Integritas ini, kami bersedia dikenakan sanksi hukum, moral, dan/atau sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., (tgl, bln, thn)

Pejabat Pembuat Komitmen

Penyelenggara,

(materai Rp. 6.000,-)

.....

.....



Lampiran 10

Contoh Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)

KOP SURAT LEMBAGA

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
PENYELENGGARAAN PROGRAM PEMETAAN DAN ANALISIS SISI PERMINTAAN
BERDASARKAN DIMENSI KUALITAS, KUANTITAS, LOKASI DAN WAKTU**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Nama Lembaga :
Jabatan :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Dana yang telah diterima untuk **Penyelenggaraan Program Bantuan Sosial (Blockgrant)** pada Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal, menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya sebagai pihak penerima dana;
2. Apabila terjadi penyelewengan dalam penggunaan dana **Penyelenggaraan Program Bantuan Sosial (Blockgrant)** tersebut menjadi tanggung jawab saya sebagai penerima dana;
3. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran maupun perhitungan dalam **Penyelenggaraan Program Bantuan Sosial (Blockgrant)** tersebut, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihannya ke Kas Negara;
4. Saya sebagai ketua lembaga penerima dana **Penyelenggaraan Program Bantuan Sosial (Blockgrant)** tersebut bertanggung jawab untuk melaksanakan/menyelesaikan program sesuai dana yang telah diterima;
5. Apabila terbukti menyalahgunakan dana bantuan sosial ini, kami bersedia dikenakan sanksi hukum, moral, dan/atau sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

....., (tgl, bln, thn)

Yang menyatakan

(materai Rp. 6.000,-)

(Nama lengkap)



Kementerian Pendidikan Nasional
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal
Kompleks Kemdiknas, Gedung E Lantai 6
Jalan Jenderal Sudirman Senayan - Jakarta 12720
www.penyelarasan.kemdiknas.go.id